KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 188.34/Kep. 01 -DPRD/2012

: 188.34/Kep. 01 /Huk/2012

LAMPIRAN : 3 (tiga) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, pada tanggal 14 Mei 2012 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** di atas adalah raperda tentang :
a. Menara Telekomunikasi;
b. Penyelenggaraan Perpustakaan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

**NOMOR : 188.34/Kep. 01 -DPRD/2012
188.34/Kep. 01/Huk./2012**

TANGGAL : 14 MEI 2012

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : TAHUN 2012

**TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik untuk berkomunikasi yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa penyediaan menara telekomunikasi untuk sarana publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bagian bentuk dari kegiatan usaha ekonomi yang menguasai hajat dan keperluan orang banyak, sehingga perlu berperan serta dalam pembangunan masyarakat;
- c. bahwa dalam interaksinya dengan keberadaan dan keperluan orang banyak sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan menara telekomunikasi perlu ditata dengan memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)

18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan atau Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang mencerminkan pembidangan urusan tersendiri.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik yang dihasilkan dalam bentuk barang atau jasa yang difungsikan penggunaannya untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul atau bentuk konstruksi lainnya sepanjang fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penye-lenggaraan telekomunikasi.
9. Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi elektronik dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, telepon seluler dan/atau media elektronik lainnya.
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
15. Izin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan dan kepentingan umum secara terus menerus.
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Izin yang diberikan pemilik menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang daerah untuk pendirian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
18. Pemakaian Ruang Udara Daerah adalah retribusi yang dikenakan kepada penyedia menara atas kegiatannya dalam melakukan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa ruang udara daerah.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
22. Tim Seleksi dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan pengkajian secara teknis terhadap setiap aspek dalam menara telekomunikasi baik pada saat pra pendirian maupun pasca pendiriannya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan dalam pembangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat atas kelancaran hubungan komunikasi dan bertukar informasi;
- b. Memberikan perlindungan dan penjaminan kepada masyarakat terhadap kemungkinan dampak dari keberadaan menara telekomunikasi;
- c. Menumbuhkan peran serta usaha penyedia menara dalam pembangunan daerah;
- d. Membuat pembatasan dan memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan menara telekomunikasi meliputi perizinan, persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, penggunaan bersama menara, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Pengendalian yang terdiri dari OPD-OPD yang membidangi urusan teknis bangunan, perhubungan, lingkungan, hukum, perencanaan ruang, gangguan, dan administrasi.
- (2) Tim Pengendalian bertugas melakukan pengkajian terhadap ketersediaan ruang wilayah, standar teknologi, teknis bangunan, unsur gangguan dan kelayakan operasi terhadap setiap permohonan izin pendirian menara telekomunikasi serta aspek-aspek lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengkajian Tim Pengendalian dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis untuk menjadi dasar bagi dipenuhi atau tidaknya permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) Tim Pengendalian memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum pendirian menara serta melakukan pengawasan dan pengkajian pasca pendirian dan beroperasinya menara telekomunikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Setiap pendirian bangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyedia menara
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Persetujuan Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Gangguan; dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan
- (4) Pengajuan setiap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara satu paket.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan izin yang disetujui berlaku penggolongan retribusi yang meliputi :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Golongan retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- (3) Golongan Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Retribusi Pemakaian Ruang Udara Daerah
- (4) Golongan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan.

Pasal 7

Tata cara, struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 serta pengaturan teknis lain berkaitan dengan permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi dalam peraturan daerah ini diatur dalam peraturan daerah lain berkenaan dengan retribusi.

BAB V
JENIS, STANDAR TEKNIS DAN PENYEDIA MENARA

Bagian Kesatu
Jenis Menara

Pasal 8

- Jenis Menara Telekomunikasi meliputi ;
- a. Menara dengan 4 kaki atau menara pipa besar tanpa kawat pancang/spanner;
 - b. Menara segitiga dengan pengokoh kawat pancang/spanner;
 - c. Pipa besi tunggal dengan kawat pancang/spanner; dan
 - d. Jenis lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Standar Teknis Menara

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun wajib memenuhi standar teknis, sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Bagian Ketiga Penyedia Menara

Pasal 10

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Penyedia menara bersama Tim Pengendalian Menara wajib memberikan penjelasan, penerangan dan/atau sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukannya pendirian menara.

BAB VI LOKASI PENDIRIAN

Pasal 11

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

- a. Rencana umum tata ruang wilayah daerah;
- b. Rencana rinci tata ruang wilayah daerah;
- c. Rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
- d. Peraturan zonasi

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi dapat ditempatkan:
 - a. diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. sebagai antena jenis pipa tunggal yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana umum tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 13

- (1) Zona larangan bagi pembangunan menara meliputi :
 - a. Sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. Kawasan Patahan Tanah;
 - c. Kawasan Hutan Lindung dan resapan air;
 - d. Lingkungan perumahan yang tidak memperoleh persetujuan masyarakat sekitarnya; dan
 - e. Lokasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Zona larangan untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut

BAB VII

MENARA BERSAMA DAN PENGATURAN JARAK

Pasal 14

- (1) Daerah pemukiman penduduk dan kawasan industri diprioritaskan untuk pembangunan menara bersama telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penyedia menara atau pengelola menara kepada Bupati pada saat melakukan permohonan perizinan.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama oleh penyedia menara dilengkapi dengan surat permohonan/pengajuan dari calon-calon pengguna tower yang meliputi :
 - a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara

telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 15

- (1) Jarak antar menara telekomunikasi bagi daerah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter.
- (2) Dalam hal koordinat lokasi yang dibutuhkan antara 2 (dua) menara telekomunikasi memiliki jarak kurang dari 300 (tiga ratus) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan menara disatukan untuk penggunaan menara secara bersama.
- (3) Pengajuan menara baru di lokasi yang sudah terdapat menara lain, diupayakan untuk disatukan dengan menara lama untuk menjadi menara bersama.

Pasal 16

Pembangunan/penggunaan menara bersama dapat dikecualikan bagi :

- a. Menara yang dibangun pada daerah diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1);
- b. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- c. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan koordinasi bagi pembinaan, pengawasan dan penertiban menara telekomunikasi di dalam wilayah administrasinya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Seleksi dan Evaluasi.

Pasal 18

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli seseorang dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap menara yang dibangun dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penyitaan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Izin mendirikan bangunan dan izin gangguan yang dimiliki penyedia menara telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku, terkecuali untuk kewajiban Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi dan Retribusi Pemakaian Ruang Udara Daerah.

Pasal 23

Dalam hal Retribusi Pemakaian Ruang Udara Daerah bagi menara telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan daerah ini, retribusi diberlakukan bagi tahun berjalan dengan tidak berlaku surut menghitung tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 24

Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah daerah diprioritaskan untuk dialihkan dan/atau digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama yang bersifat tunggal.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Disahkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

UCOK UJANG WARDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

**NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/201
188.34/Kep. 01/Huk./2012**

TANGGAL : 14 MEI 2012

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyediaan pusat informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan yang dapat memberikan jaminan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat Purwakarta;
- b. bahwa untuk memenuhi upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat, perlu penyelenggaraan perpustakaan yang dikembangkan dan didayagunakan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Kearsipan (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Purwakarta, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Purwakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Kantor Perpustakaan, yang selanjutnya dapat disingkat sebagai Kantor adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri yang membidangi urusan perpustakaan.
7. Kepala Perpustakaan adalah Kepala OPD yang membidangi urusan perpustakaan Kabupaten Purwakarta.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pengguna Pustaka.
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pengguna Pustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan bersifat umum maupun khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
16. Perpustakaan Swasta adalah perpustakaan bersifat umum maupun khusus yang dimiliki oleh perorangan, kelompok masyarakat dan/atau lembaga berbadan hukum di luar Pemerintah Daerah;
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka yang selanjutnya disebut sebagai Pengguna Pustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Pemustaka khusus yang selanjutnya disebut sebagai Pengguna Pustaka Khusus adalah pengguna perpustakaan yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan, yaitu

perseorangan, kelompok orang, atau lembaga, yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

20. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
21. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
22. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
23. Alih Media Pustaka adalah pengalihmediaan pustaka dari bentuk tercetak ke dalam bentuk media lainnya atau sebaliknya.
24. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Purwakarta.

BAB II PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Asas, Fungsi dan Tujuan

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pengguna Pustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kedua Pembentukan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pengguna Pustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional melalui Kepala Perpustakaan.

Pasal 6

Pembentukan perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) di atas, dikelompokkan sebagai Perpustakaan Milik Daerah yang terdiri atas :

- a. perpustakaan daerah;
- b. perpustakaan umum kecamatan;
- c. perpustakaan umum kelurahan/desa;
- d. perpustakaan sekolah negeri;
- e. perpustakaan keliling;
- f. perpustakaan OPD; dan
- g. taman bacaan masyarakat atau rumah baca.

Pasal 7

Selain perpustakaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6, orang perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga berbadan hukum dapat mendirikan perpustakaan yang dikelompokkan sebagai Perpustakaan Swasta yang terdiri atas :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan khusus;
- c. perpustakaan sekolah; dan
- d. perpustakaan keliling.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 8

Penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.

Bagian Keempat Pengelolaan Perpustakaan

Paragraf 1 Cakupan Pengelolaan

Pasal 9

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan perpustakaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan perpustakaan.
- (2) Pengelolaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan perpustakaan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.

- (5) Pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (6) Perpustakaan yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dievaluasi untuk menentukan tingkat kualifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan menyusun rencana kerja dan/atau rencana strategis lima tahunan yang dirinci dalam rencana kerja tahunan.
- (2) Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana kerja dan/atau rencana strategis yang disetujui oleh lembaga induknya.
- (3) Kebijakan pengelolaan sebagaimana ayat (2) di atas meliputi urusan :
 - a. Pemeliharaan dan penataan sarana dan bahan perpustakaan;
 - b. Manajemen Administrasi pelayanan perpustakaan;
 - c. Promosi Layanan Perpustakaan;
 - d. Kerjasama Layanan Perpustakaan; dan
 - e. Pengawasan perpustakaan
- (4) Perpustakaan memiliki prosedur baku.

Pasal 12

- (1) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
- (2) Indikator kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan.

Paragraf 2

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Kepala perpustakaan bertanggungjawab terhadap pengembangan tenaga yang mencakup kompetensi dan karir tenaga perpustakaan.
- (2) Pengembangan kompetensi dan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.

Paragraf 3

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.
- (3) Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.

- (4) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Bagian Kelima Pengembangan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pengguna Pustaka dan/atau masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bab III Jenis Perpustakaan

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Pasal 16

- (1) Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta yang diselenggarakan secara terbuka bagi pengguna pustaka dari setiap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
- (2) Perpustakaan umum memiliki koleksi perpustakaan berupa semua bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai informasi, pendidikan, dan hiburan sebagai wisata pustaka yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada setiap pengguna pustaka.
- (3) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, bagi perpustakaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, b, dan c mencakup penyediaan koleksi yang mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing.
- (4) Perpustakaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, b, dan c menyelenggarakan pelayanannya dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Perpustakaan Sekolah

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang dibentuk di setiap sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Perguruan Tinggi sebagai wahana baca bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak lain yang berkepentingan terhadap bidang pendidikan.

- (2) Setiap sekolah dari mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan sekolah.
- (3) Perpustakaan Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib serta Lembar Kerja Siswa (LKS) pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengguna pustaka tambahan selain dari peserta didik dan tenaga pendidik yang diperkenankan memiliki keanggotaan di perpustakaan sekolah.
- (5) Pemberian hak keanggotaan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilakukan dengan menimbang kontribusi positifnya bagi pengembangan perpustakaan serta berlandaskan pada peran serta perpustakaan dalam upaya turut mencerdaskan masyarakat.
- (6) Pemberian hak keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas kewenangannya berada pada Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 18

- (1) Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang penyelenggaraan pelayanannya diperuntukkan bagi pengguna pustaka dalam lingkungan terbatas dan/atau perpustakaan yang membatasi koleksi perpustakaannya pada satu jenis media atau bidang tertentu.
- (2) Lingkungan terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi :
 - a. Perpustakaan Organisasi; dan
 - b. Perpustakaan Komunitas.
- (3) Koleksi perpustakaan pada satu jenis media atau bidang tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi:
 - a. Pustaka Agama;
 - b. Pustaka Budaya;
 - c. Pustaka Sains dan Teknologi;
 - d. Pustaka Budi Daya;
 - e. Perpustakaan Majalah dan Surat Kabar;
 - f. Perpustakaan Digital; dan
 - g. Perpustakaan jenis dan bidang lainnya sejauh dapat menjadi wahana informasi dan pendidikan.
- (4) Perpustakaan OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f merupakan jenis perpustakaan khusus yang wajib dibentuk oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur OPD masing-masing.
- (5) Perpustakaan OPD sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (4) di atas dikecualikan bagi OPD yang membidangi urusan perpustakaan.

Bagian Keempat Perpustakaan Keliling

Pasal 19

- (1) Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan atau kendaraan dalam melakukan pelayanannya terhadap pengguna pustaka.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan keliling milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e wajib mendahulukan wilayah-wilayah yang belum memiliki perpustakaan menetap.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan keliling milik Swasta sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e wajib memiliki ijin dan melakukan pemberitahuan atas wilayah operasionalnya.

Bagian Kelima Taman Bacaan Masyarakat atau Rumah Baca

Pasal 20

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau Rumah Baca (RB) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g adalah suatu tempat yang menyediakan koleksi perpustakaan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan baca primer masyarakat yang didirikan di lokasi-lokasi tertentu sebagai wahana pendidikan dan rekreasi pustaka.

Pasal 21

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna pustaka, pembinaan serta pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, Pemerintah Daerah mengupayakan pendirian Taman-Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau Rumah Baca (RB).

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Koleksi perpustakaan daerah diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pengguna pustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Koleksi perpustakaan daerah mencakup jenis, jumlah, pengembangan, perawatan, dan pelestarian koleksi.
- (3) Koleksi perpustakaan daerah disusun dalam bentuk daftar Katalog Induk Daerah (KID).

Bagian Kedua Jenis Koleksi

Pasal 23

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

- (2) Jenis koleksi perpustakaan umum kabupaten sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, muatan lokal, naskah kuno, koleksi deposit, koleksi khusus, dan hasil penelitian.
- (3) Jenis koleksi perpustakaan umum kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas buku fiksi dan non fiksi serta peta wilayah kecamatan.
- (4) Jenis koleksi perpustakaan umum kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas buku non fiksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna pustaka di wilayah adminstrasinya serta peta wilayah demografis.
- (5) Jenis koleksi perpustakaan sekolah negeri sekurang-kurangnya terdiri atas buku teks wajib pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS).
- (6) Jenis koleksi perpustakaan OPD sekurang-kurangnya terdiri atas buku peraturan perundang-undangan, terbitan berkala, serta buku-buku non fiksi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
- (7) Jenis koleksi taman bacaan masyarakat atau rumah baca sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, non fiksi, serta alat peraga dan alat permainan edukatif.
- (8) Jenis koleksi perpustakaan swasta sekurang-kurangnya terdiri atas nonfiksi terkecuali bagi perpustakaan khusus.

Bagian Ketiga Jumlah Koleksi

Pasal 24

- (1) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan kebutuhan pengguna pustaka.
- (2) Jumlah koleksi dalam bentuk buku teks pelajaran di perpustakaan sekolah negeri dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (3) Setiap perpustakaan berupaya menambah jumlah koleksi secara berkala dan berkelanjutan.

Bagian Keempat Pengembangan Koleksi

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Umum Daerah menyusun kebijakan pengembangan koleksi yang dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengembangan koleksi.
- (4) Pengembangan koleksi mencakup penyediaan koleksi untuk kelompok pengguna pustaka khusus.

Bagian Kelima Perawatan dan Pelestarian Koleksi

Paragraf 1 Perawatan

Pasal 26

- (1) Setiap perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi perpustakaan secara berkala.

- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Paragraf 2 Pelestarian

Pasal 27

Perpustakaan Umum Kabupaten melakukan pelestarian koleksi terhadap semua bentuk aset informasi.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 28

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan kebutuhan Pengguna Pustaka khusus.

Pasal 29

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana layanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi sekurang-kurangnya berupa perabot sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi sekurang-kurangnya berupa perabot, peralatan, perlengkapan sistem temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana layanan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa perabot dan peralatan sesuai dengan jenis layanan perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan layanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan;
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan, gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan harus berada di lokasi yang mudah diakses
- (3) Gedung atau ruang harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki ruang koleksi, ruang baca, ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
- (5) Perpustakaan Umum Daerah menyediakan fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perpustakaan keliling

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Cakupan Layanan

Pasal 32

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pengguna Pustaka.
- (2) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan.
- (3) Kantor Perpustakaan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada setiap pengelola perpustakaan untuk mencapai layanan perpustakaan secara prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua Sistem dan Jenis Pelayanan

Pasal 33

- (1) Pelayanan perpustakaan mengatur sistem pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Sistem layanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing perpustakaan.

Pasal 35

- Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (1) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
 - (2) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi dan layanan referensi.
 - (3) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

Bagian Ketiga Layanan Terpadu

Pasal 36

- (1) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (2) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Bagian Keempat Administrasi Layanan

Pasal 37

- (1) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (2) Administrasi Layanan Perpustakaan diselenggarakan untuk tujuan memudahkan dan menjamin pelaksanaan kerja secara efektif dalam pengelolaan layanan.
- (3) Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi Layanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas layanan.
- (5) Pengembangan sistem Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima Waktu Layanan

Pasal 38

- (1) Waktu dan jumlah jam layanan perpustakaan pada perpustakaan milik daerah sesuai dengan waktu dan jam kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Waktu dan jumlah jam layanan perpustakaan pada perpustakaan swasta disesuaikan dengan kebutuhan pengguna pustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pengguna pustaka dalam menggunakan perpustakaan.

Bagian Keenam Kerjasama Layanan

Pasal 39

Kerjasama layanan dilakukan dengan perpustakaan lain, sesama unit kerja dalam lingkup organisasi dan/atau dengan pihak lain yang berkepentingan di bidang perpustakaan.

Bagian Ketujuh Manajemen Layanan

Pasal 40

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Bagian Kedelapan Promosi Layanan

Pasal 41

- (1) Promosi Layanan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta peningkatan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (2) Promosi Layanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

BAB VII
KEDUDUKAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum Kabupaten berkedudukan sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan dan perpustakaan deposit bagi perpustakaan-perpustakaan lain yang ada di daerah.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli di bidang perpustakaan.
- (3) Kepala perpustakaan diangkat dari pustakawan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli di bidang perpustakaan.
- (5) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

Bagian Kedua
Pustakawan

Pasal 44

Pustakawan mempunyai tugas memberikan informasi yang cocok dan tepat waktu bagi pihak yang memerlukan dengan memberikan bimbingan akses pada sumber daya informasi, baik yang berada di dalam perpustakaan tempat dia bekerja maupun di luar perpustakaan dengan memanfaatkan beragam basis data, fasilitas jaringan telekomunikasi, serta kerjasama antar perpustakaan maupun dengan lembaga lainnya.

Pasal 45

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga sertifikasi.

Pasal 46

- (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- (4) Pustakawan yang memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Pasal 47

- (1) Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan.
- (2) Sertifikat kompetensi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Ketiga Tenaga Teknis Perpustakaan

Pasal 48

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan perpustakaan lainnya.

Pasal 49

- (1) Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya.
- (2) Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma II (D-II) ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 50

- (1) Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- (4) Tenaga teknis perpustakaan yang memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Pasal 51

- (1) Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Keempat Kepala Perpustakaan

Pasal 52

- (1) Kepala perpustakaan mempunyai tugas memimpin, mengelola, dan mengembangkan perpustakaan.
- (2) Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.

Pasal 53

Kepala Perpustakaan adalah pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
- b. menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis;
- c. menguasai teknologi informasi;

BAB IX PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan perpustakaan daerah didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 55

pendanaan perpustakaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sebagian anggaran pendidikan;
- d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- e. kerja sama yang saling menguntungkan;
- f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- g. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Sumber pendanaan dari sebagian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat huruf b mencakup :

- a. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Daerah bagi penyelenggaraan perpustakaan daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- b. Setiap sekolah wajib untuk mengalokasikan dana paling sedikit 20% dari anggaran belanja operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk pengembangan perpustakaan sekolah.

Pasal 57

Pengelolaan dana yang bersumber dari hasil jasa usaha perpustakaan dilakukan secara swakelola dan dialokasikan untuk kepentingan pengembangan perpustakaan secara transparans.

Pasal 58

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 59

- (1) Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 18 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

UCOK UJANG WARDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

**NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2012
188.34/Kep. 01/Huk./2012**

TANGGAL : 14 MEI 2012

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung operasional pelayanan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3238);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

23. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani bidang administrasi kependudukan.

4. Bupati adalah Bupati Purwakarta
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta selaku Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
7. Kas Daerah adalah bank pemerintah yang ditunjuk sebagai pemegang kas daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Warga Negara Asing adalah orang-orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia.
11. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, ktp dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil adalah meliputi kartu tanda penduduk (ktp), kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu tanda penduduk yang selanjutnya disingkat dengan (ktp) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. ktp Elektronik (e-ktp) adalah ktp berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah ktp yang memiliki format ktp Nasional dengan system pengaman khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
16. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat baru.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
18. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting data kehidupan seseorang pada register yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya Kutipan/salinan Akta Otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.
19. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang sah setelah dicatat pencatat sipil meliputi Kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan dan perubahan nama.
20. Akta Kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas setelah adanya pelaporan pencatatan baik tepat waktu maupun terlambat melaporkan pencatatannya.
21. Akta Kematian adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas berdasarkan tempat terjadinya peristiwa itu.
22. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.

23. Akta Perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas bagi warga non muslim setelah mereka melaksanakan perkawinan secara agama.
24. Akta Perceraian adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas setelah memperoleh penetapan Hakim Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
25. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
26. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register catatan sipil sebagai lembaran bukti sah diri penduduk menyangkut peristiwa penting.
27. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat ada perubahan data.
28. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
29. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
30. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
31. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
33. Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan adalah bukti pengesahan ulang tentang keabsahan Dokumen Administrasi Kependudukan mencakup KK, KTP, SKTS, SKTT dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
34. Lembar Informasi Kependudukan adalah lembar informasi data bersifat mikro faktual berupa dokumentasi statistik makro maupun detail atas data satu jiwa penduduk sampai dengan seluruh penduduk Daerah yang sifat informasinya didasarkan atas kriteria kependudukan mencakup jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, usia, dan lahir mati pindah datang (LAMPID).
35. Lembar pendaftaran penduduk adalah formulir-formulir isian biodata penduduk sebagai bahan bagi diterbitkannya dokumen-dokumen administrasi kependudukan.
36. Izin tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
37. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
38. Biaya cetak adalah penggantian biaya cetak blangko dan pengisian dokumen kependudukan yang meliputi akta catatan sipil.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Peristiwa Kependudukan
 1. kartu tanda penduduk (ktp)
 2. Kartu Keluarga (KK)
 3. Surat Keterangan Kependudukan
 - b. Pelayanan Peristiwa Penting
 1. Kutipan Akta Perkawinan
 2. Kutipan Akta Perceraian
 3. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 4. Kutipan Akta Pengangkatan Anak
 5. Kutipan Akta Perubahan nama
 - c. Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil yang diberikan terhadap :
 - a. Pengungsi dan korban bencana di daerah;
 - b. Penduduk yang mengalami perubahan alamat akibat terjadinya pemekaran/penggabungan wilayah atau pembangunan oleh pemerintah daerah;
 - c. Cetak ktp atau e-ktp untuk penduduk WNI yang tidak diakibatkan dari hilang atau rusaknya ktp atau e-ktp yang pernah diterbitkan;
 - d. Cetak Kartu Keluarga untuk penduduk WNI yang tidak diakibatkan dari hilang atau rusaknya kartu keluarga yang pernah diterbitkan;
 - e. Penerbitan Akta Kelahiran bagi WNI.
- (4) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Struktur dan Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1.	kartu tanda penduduk (ktp)	
	WNI	0,-
	WNA	Rp. 75.000,-
2.	kartu tanda penduduk (ktp) karena rusak/hilang dan atau keterlambatan	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 100.000,-
3.	kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp)	
	WNA	Rp. 250.000,-
4.	kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) karena rusak/hilang dan atau keterlambatan	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 250.000,-

5.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	
	a) Ijin Terbatas	Rp. 150.000,-
	b) Ijin Tetap	Rp. 100.000,-
6.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) karena hilang/rusak dan atau terlambat	
	a) Ijin Terbatas	Rp. 300.000,-
	b) Ijin Tetap	Rp. 200.000,-
7.	Kartu Keluarga	
	WNI	0,-
	WNA	Rp. 50.000,-
8.	Kartu Keluarga karena hilang/rusak atau tidak dapat dipergunakan	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 50.000,-
9.	Surat Keterangan Pindah antar Provinsi/Kabupaten/Kota	
	a) datang	
	1) WNI	Rp. 50.000,-
	2) WNA	Rp. 250.000,-
	b) pindah	
	1) WNI	Rp. 10.000,-
	2) WNA	Rp. 100.000,-
10.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	
	a) WNI	Rp. 20.000,-
	b) WNA	Rp. 150.000,-
11.	Surat Keterangan Pergi ke Luar Negeri	
	a) WNI	0,
	b) WNA	Rp. 100.000,-
b Biaya Cetak Akta Catatan Sipil		
1.	Kutipan Akta Kelahiran	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 100.000,-
2.	Kutipan Akta Kelahiran ke II dan seterusnya	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 250.000,-
3.	Kutipan Akta Perkawinan	
	a) WNI	
	1) di dalam kantor	Rp. 100.000,-
	2) diluar kantor	Rp. 200.000,-
	b) WNA	
	1) di dalam kantor	Rp. 300.000,-
	2) diluar kantor	Rp. 400.000,-
4.	Kutipan Akta Perkawinan ke II dan seterusnya	
	a) WNI	Rp. 100.000,-
	b) WNA	Rp. 300.000,-
5.	Kutipan Akta Perceraian	
	a) WNI	Rp. 150.000,-
	b) WNA	Rp. 300.000,-
6.	Kutipan Akta Perceraian ke II dan seterusnya	
	a) WNI	Rp. 150.000,-
	b) WNA	Rp. 300.000,-

7.	Kutipan Akta Kematian	
	a) WNI	Rp. 10.000,-
	b) WNA	Rp. 150.000,-
8.	Pengesahan Anak	
	a) WNI	Rp. 100.000,-
	b) WNA	Rp. 200.000,-
9.	Kutipan Akta Pengakuan Anak	
	a) WNI	Rp. 100.000,-
	b) WNA	Rp. 200.000,-
10.	Kutipan Akta Perbaikan dan Perubahan/Ganti Nama	
	a) WNI	Rp. 50.000,-
	b) WNA	Rp. 300.000,-
c. Legalisasi Dokumen Kependudukan		
	1. WNI (per lembar)	Rp. 1.000,-
	2. WNA (per lembar)	Rp. 5.000,-

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan kondisi wajib retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 3, tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) WNA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 4, tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) karena rusak/hilang dan/ atau keterlambatan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013;

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

UCOK UJANG WARDI